

ANALISIS KASUS TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA*

Cholisin**

*Disampaikan Pada Bimtek Pendidikan Buddha dan Karakter Bangsa MKKS SMA/MA Kabupaten Bantul di Hotel E-DOTEL SMKN 6 Yogyakarta, 12 Nopember 2011.

** Staf Pengajar Jurusan PKn & Hukum FIS UNY

PENDAHULUAN

Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika. **Pendidikan karakter** adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil (Tim Pendidikan Karakter .2010: 11). **Karakter Bangsa** adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa ,2010 : 7) Pendidikan karakter rakyat menurut Bung Hatta, adalah: mandiri, tahu hak dan kewajiban, mau mengambil tanggung jawab (Rikard Bagun.2002: xix).

ISSP (*International Social Survey Programme*) yang berbasis di Norwegia pada tahun 1995 (melibatkan 23 negara) dan 2003 (melibatkan 34 negara) menunjukkan terdapat korelasi positif antara semangat kebangsaan dan tingkat kemakmuran sebuah bangsa. Permasalahannya meskipun karakter bangsa itu penting, dan kita telah memiliki sumber nilai karakter yaitu nilai dasar Pancasila sebagai ideologi komprehensif yang jauh lebih unggul dari ideologi liberal dan sosialis kiri (komunis) yang partikular, namun kondisi karakter bangsa masih memprihatinkan.

Keunggulan Pancasila diakui oleh filsuf maupun ahli sejarah asing. Setelah Pidato Soekarno di PBB pada 30 Sept 1960, "*To Build the Worlds Anew*" yg memperkenalkan Pancasila kepada Dunia, Russel memuji Pancasila sebagai jalan tengah dan menyebut Soekarno sebagai *Great Thinker in the East* .(Yudi Latif, 2011:.47). Bertrand Russell filsuf Inggris (Yudi Latif, 2011) Pancasila dipuji sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang mempresentasikan ideologi kapitalis) dengan *Manifesto Komunis* (yang mempresentasikan ideologi komunis). Ahli Sejarah Rutgers (Yudi Latif, 2011) . Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada semua revolusi

melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu.

Makalah ini akan memfokuskan pada upaya memahami kasus makro dan mikro pendidikan karakter (pendidikan budaya dan karakter) bangsa. Kasus makro dalam hal ini dimaksudkan adalah ruang lingkup nasional dan kasus mikro adalah dalam ruang lingkup pendidikan (khususnya sekolah).

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA: KASUS MAKRO

Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yaitu : (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Ancaman disintegrasi bangsa. (6) Melemahnya kemandirian bangsa (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025).

Masalah di atas, merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan. Koentjaraningrat (1974) dalam *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, menyatakan sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia: (1) meremehkan mutu; (2) cenderung mencari jalan pintas (menerabas) (misalnya. : main belakang, orang dalam, semua bisa diatur, satu meja satu amplop, urusan diselesaikan dengan damai,pen.); (3) tidak percaya diri; (4) tidak berdisiplin (misalnya.: jam karet, vonis dapat ditentukan di belakang meja, membuang sampah sembarangan, lebih takut kepada polisi daripada kepada peraturan, terlambat dalam mengerjakan banyak hal, tawuran, sidang pleno di DPR tak pernah lengkap,pen.); dan (5) mengabaikan tanggung jawab (misalnya. : tidak amanah, khianat, korupsi massal, penyalahgunaan kekuasaan,pen.). Sedangkan Muchtar Lubis (1986) menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia: (1) hipokritis alias munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab; (3) berjiwa feodal; (4) masih percaya takhyul; (5) artistik; (6) memiliki watak yang lemah; (7) bukan *economic animal*;

Belum terpecahkannya masalah karakter bangsa, menjadikan Indonesia belum mencapai kemajuan yang mensejahterakan rakyat yang merata dan berkeadilan. Sebagai bangsa yang pernah dijajah negara kapitalis – imperialis yang menindas dan menyengsarakan, justru Indonesia tidak mampu keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak berkeadilan ini. Bangsa Indonesia dipaksa untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden; (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF; dan (3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia (Revrison Baswir.2009).

Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan keadilan sosial yang secara tegas ditentukan pasal 33 UUD 1945, justru tidak dijalankan. Ini menunjukkan adanya krisis karakter kepercayaan diri, kemandirian dan

nasionalisme yang sangat rendah. Krisis karakter ini dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, “*menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.*” Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, “*menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa.*”

Hubungan Indonesia dengan organisasi donor (IMF, CGI, World Bank, ADB) dan negara-negara pemberi pinjaman (AS, Jepang, EU), sudah mendekati hubungan antara “pengemis-pemberi sedekah.” Sikap dan perilaku demikian ini sangat bertentangan dengan gagasan dasar berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sikap ketergantungan yang terus-menerus atas bantuan asing (*foreign assistance*) sangat bertentangan dengan konsep awal “*nation and character building*”. (Otho H. Hadi, www.google.com/otto-2000910150958/ diunduh, 10 Januari 2011)

Sistem ekonomi kapitalis (*neo-liberalisme*) memberikan lahan yang subur bagi berkembangnya pragmatisme, individualisme dan materialisme. Hal ini berdampak pada berkembangnya sikap dan perilaku politik transaksional dan kartel. Sikap dan perilaku politik yang demikian, politik dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dan material yang sebesar-besarnya bagi diri dan kelompoknya. Kemudian ketika ada penyimpangan yang dilakukan diantara mereka, diatasi dengan cara saling menutupi. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor merosotnya mutu penyelenggara negara. Indikasinya tampak merosotnya tingkat kualitas hidup penduduk ke-124 dari 187 negara yang disurvei Program Pembangunan PBB tahun ini, dibandingkan tahun lalu yang berada di urutan ke-108 dari total 169 negara (Tajuk Rencana : Spirit Pahlawan Melapuk, Kompas, Kamis 10 Nopember, 2011).

Dalam konteks ini Komarudin Hidayat (Kompas, 5 Nopember 2011) memberikan contoh perilaku sosial di Indonesia yang sangat jauh dari ajaran Islam adalah maraknya korupsi, sistem ekonomi dengan bunga tinggi, kekayaan tak merata, persamaan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan negara dan untuk berkembang serta banyak aset sosial yang mubazir. Memperhatikan contoh tersebut, menambah keprihatinan karena Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim belum mampu menampilkan perilaku kesalehan sosial untuk memperkokoh karakter bangsa. Tampaknya keberagamaan kita lebih senang di level semarak ritual untuk mengejar kesalehan individual, tetapi menyepelekan kesalehan sosial.

Dalam dialog nasional “Peran Kebudayaan Sunda dalam Membangun dan Memperkuat Karakter Bangsa di Universitas Pajajaran, dihasilkan kesimpulan bahwa karakter bangsa yang kuat tidak mudah dibangun karena terhambat sejumlah masalah. Konflik berkelanjutan, korupsi yang meluas, kekerasan yang akut, kepalsuan yang mengejala, hedonism yang tak terbendung, dan gaya hidup boros menghambat pembangunan karakter bangsa. Untuk memperkuat karakter bangsa menurut Yasraf Amir Piliang dapat dengan cara merevitalisasi kekuatan budaya lokal, pengetahuan lokal, dan psikologi lokal (Kompas, 7 Nopember 2011).

Tampak kebijakan yang tidak konsisten dengan nilai –nilai dasar Pancasila dan kultur individualistis, pragmatis, materialism, hedonistik merupakan akar penyebab melemahnya karakter bangsa.

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA: KASUS MIKRO

Sekolah dewasa ini banyak mendapat perhatian publik terutama terkait dengan berbagai kasus yang menggambarkan masih perlunya pengembangan karakter di sekolah. Berbagai kasus tawuran pelajar, pemalakan, mengindikasikan hal ini. Berikut ini diberikan contoh hasil penelitian dan pengalaman yang dilakukan sekolah dalam penguatan karakter.

Ada temuan amat menarik hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa hasil tes standar pada sekolah – sekolah di California selama 1999 sampai 2002 secara signifikan berkorelasi positif dengan kemampuan sekolah menciptakan kultur sekolah berupa “a clean and safe physical environment”. Disamping itu prestasi siswa juga berkorelasi positif dan signifikan dengan partisipasi orang tua dan peran guru sebagai model bagi peserta didik, serta kesempatan siswa untuk berkontribusi pada kegiatan sekolah dan kegiatan masyarakat, sesuai dengan gaya peserta didik sendiri (Zamroni, 2011 : 177).

Suatu pengalaman menarik dituturkan Muhammad Arasy (“Memajukan Sekolah Pinggiran”, Kompas, 2 November 2011) Kepala SMAN 3 Palu. Untuk membangkitkan ketrampilan SMAN 3 Palu, Sulawesi Tengah, yang mengalami kebakaran pada Maret 2002, dengan melakukan penghijauan. Ia yakin dengan suasana hijau pepohonan dan tanaman hias di seliling sekolah dapat memberikan ketenangan, kesejukan, dan semangat belajar para siswa dan guru. Semangat penghijauan dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Ia memotivasi guru untuk memakai penghijauan sebagai pintu masuk memperkuat pendidikan karakter siswa yang cinta lingkungan. Sekolah juga menerapkan tata tertib yang membangun karakter siswa. Ia juga memberikan ruang ibadah siswa dari pemeluk agama yang berbeda dalam menerapkan keberagaman dan toleransi. Sekolah yang semula dipandang sebagai **sekolah pinggiran**, menjadi “kiblat” sekolah berwawasan lingkungan, dan sekolah percontohan karakter tingkat provinsi. Di tingkat pusat Badan Narkotika Nasional menjadikan SMAN 3 Palu sebagai percontohan bebas narkoba. Prestasi sekolah terus meningkat. Pada 2006 – 2007 dirintis sebagai sekolah kategori mandiri, karena keunggulan sebagai sekolah hijau, dan ditetapkan sebagai sekolah standar nasional (SSN). Kemudian tahun 2009-2010, diberi predikat sekolah model, karena telah memenuhi standar nasional serta mampu mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Prestasi yang telah dicapai sekolah, membuat sekolah diminati siswa baru, tahun lalu peminatnya 1000 orang meskipun daya tampungnya hanya 400 orang. Direktorat SMA Kemdiknas menawari RSBI, tetapi ditolak dengan pertimbangan sekolah ini banyak anak dari keluarga ekonomi lemah. Bahkan ada banyak anak yang digratiskan.

Dari kasus di atas, tampaknya bahwa strategi implementasi pendidikan karakter yang ditekankan adalah memotivasi guru dan pengembangan kultur sekolah menjadi daya efektivitas. Dalam keterkaitan ini, Zamroni (2011 :175) menawarkan strategi implementasi pendidikan karakter, sbb.:

1. Tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai harus jelas konkret.
2. Pendidikan karakter akan lebih efektif dan efisien kalau dikerjakan tidak hanya oleh sekolah, melainkan harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa.
3. Menyadarkan pada semua guru akan peran yang penting dan bertanggungjawab dalam keberhasilan melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan karakter.
4. Kesadaran guru akan perlunya “*hidden curriculum*” sebagai instrument yang amat penting dalam pengembangan karakter peserta didik.

5. Dalam melakukan pembelajaran guru harus menekankan pada daya kritis dan kreatif peserta didik, kemampuan bekerja sama, dan ketrampilan mengambil keputusan.
6. Kultur sekolah harus dimanfaatkan dalam pengembangan karakter peserta didik.
7. Pada hakekatnya salah satu fase pendidikan karakter adalah merupakan proses pembiasaan dalam kehidupan sehari – hari.

Kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter perlu diciptakan. Kultur sekolah adalah norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah dan telah diwariskan antar generasi, dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindakan seluruh warga. Pembelajaran yang baik hanya dapat berlangsung pada sekolah yang memiliki kultur positif. Suatu kultur sekolah yang sehat akan berdampak kesuksesan siswa dan guru dibandingkan dengan dampak bentuk reformasi pendidikan yang lain. (Zamroni, 2009)

Kultur sekolah yang sehat dan positif berkaitan erat dengan: motivasi dan prestasi siswa dan produktivitas dan kepuasan guru. Racun kultur negatif di sekolah misalnya: diktator, komentator, agitator, dan spectator.

Tabel 1. Kultur Sekolah

KULTUR SEKOLAH YANG POSITIF	KULTUR SEKOLAH NEGATIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keyakinan hanya mereka yang belajar keras dan sungguh-sungguh akan memperoleh prestasi tinggi 2. Memegang teguh nilai prestasi dan proses mencapainya merupakan dua sisi dari mata uang 3. Membangun jembatan antara visi, misi dan aksi 4. Memiliki simbol-simbol yang menekankan penghargaan dan sanksi, sehingga mendorong pencapaian ekelensi dan menghambat pelanggaran & tidak memiliki prestasi rendah 5. Lingkungan sekolah bersih, rapi, sejuk dan aman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keyakinan asal belajar meski apa adanya pasti lulus 2. Memiliki nilai prestasi harus setinggi mungkin, dengan segala cara untuk mencapainya 3. Kebijakan kepala sekolah bersifat pilih kasih 4. Visi, misi dan program sekolah tidak disosialisasikan dengan benar kepada seluruh stake holder 5. Diantara warga sekolah tidak ada saling percaya mempercayai 6. Mereka yang inovatif malah dikritik, tidak disenangi 7. Hasil karya siswa dan prestasi sekolah yang hebat tidak dipajang sebagaimana mestinya 8. Sampah berserakan dimana-mana di lingkungan sekolah 9. Banyak siswa dan guru terlambat datang ke sekolah

PENUTUP

Kasus yang terkait dengan pendidikan karakter baik secara makro dan mikro, perlu dicarikan strategi pemecahannya. Tampaknya bukan pada persoalan nilai karena nilai – nilai

dasar Pancasila memadai sebagai sumber pendidikan karakter, tetapi pada komitmen. Komitmen untuk mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh baik secara struktural dan kultural dan sebagai gerakan nasional merupakan factor penting untuk efektifitas pendidikan karakter.

Bacaan:

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025, Pemerintah Republik Indonesia, 2010, halaman v).

Muhammad Arasy , “Memajukan Sekolah Pinggiran”, Kompas, 2 November 2011, sosok.

Pembangunan Karakter Bangsa : Konflik dan Korupsi Jadi Hambatan Kuat, Kompas, 7 Nopember 2011.

Rikard Bagun.2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*, halaman xix.

Revrisond Baswir.2009, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Tim Pendidikan Karakter .2010. *Pendidikan Karakter Di Smpkementerian Pendidikan Nasional Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP 2010*, halaman 11.

Tajuk Rencana : Spirit Pahlawan Melapuk, Kompas, Kamis 10 Nopember, 2011.

Otho H. Hadi, MA (Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas). *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*. Tulisan ini disusun dari hasil diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas-red., www.gogle.com/otto-2000910150958/ diunduh, 10 Januari 2011, halaman 2-3)

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* , Jakarta : Gramedia

Zamroni, 2009. *Pembelajaran IPS Dan Kultur Baru Sekolah*, Disampaikan dalam Kegiatan Refreshing Dosen FISE UNY.

Zamroni,2011, *Strategi dan Model Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, dalam Darmiyati Zuhdi, Editor, 2011, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Yogyakarta : UNY Press.

